

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan memiliki arti suatu proses yang terdiri dari suatu bentuk perubahan tingkah laku maupun struktur sosial dan ekonomi di suatu wilayah. Pembangunan memiliki tujuan agar dapat mengatasi ketimpangan yang ada dan mencegah peningkatan kemiskinan di suatu wilayah (Todaro, 2006: 24). Pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga dapat mengurangi kemiskinan (Miranti, 2014). Pembangunan ekonomi sangat bergantung pada adanya pertumbuhan ekonomi dan faktor geografis (Spolaore dan Wacziarg, 2013). Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi merupakan suatu bentuk hasil pelaksanaan kebijakan secara nyata yang dilakukan oleh pemerintah. Suatu Negara dapat dikatakan sebagai negara yang berkembang, apabila kebutuhan seluruh masyarakatnya di dalam suatu wilayah sudah terpenuhi dengan baik (Lawal dan Oluwatoyin, 2011).

Pembangunan ekonomi di Indonesia telah mengalami banyak kemajuan. Berawal dari suatu negara yang perekonomiannya berbasis tradisional hingga saat ini Indonesia telah menjadi bagian negara dengan skala besar di bidang industri manufaktur dan jasa. Dengan adanya kemajuan perekonomian negara ini juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan perkapita maupun perbaikan pada berbagai indeks sosial dan ekonomi. Pembangunan ekonomi menurut Adam Smith merupakan suatu hubungan antara pertumbuhan penduduk dengan kemajuan teknologi (Suryana, 2000:55).

Pertumbuhan ekonomi dapat ditunjukkan dari besarnya pendapatan Produk Domestik Regional Bruto (Afzal, 2007). PDRB tersebut diperoleh melalui pendapatan total setiap orang yang ada di dalam perekonomian, kenaikan produk dan jasa setiap tahunnya juga disebut pertumbuhan ekonomi (Altiner, 2012). Penggunaan sumber daya yang efisien juga sangat diperlukan (Woods, 2007). Efisiensi sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi karena dapat memberikan efisiensi dari segi waktu dan tenaga (Andersen dan Babula, 2008). Peningkatan pendapatan masyarakat tentu berkaitan dengan kesempatan kerja yang ada dalam wilayah tersebut, sehingga penentuan sektor potensial sangat diperlukan untuk mengetahui sektor mana yang memiliki kemampuan untuk memajukan daerah dan memberikan kesempatan kerja (Kusuma, 2016). Suatu daerah jika sudah mengetahui potensi yang dimiliki, maka akan memiliki peluang besar untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya yang belum memahami potensi sektor ekonomi daerahnya (Martono, 2008). Penentuan sektor potensial di setiap daerah dapat dilihat dari besar kecilnya pendapatan setiap sektor ekonomi pada Produk Domestik Regional Bruto suatu wilayah (Suryahadi, 2012). Penentuan sektor potensial melalui besarnya kontribusi pendapatan sektoral tidaklah cukup, kebijakan otonomi daerah untuk mengatur daerahnya juga diperlukan (Kesuma, 2015). Dampak dari kebijakan otonomi daerah terhadap disparitas saling terkait dengan perkembangan tingkat pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah (Irawan, 2017).

Perbedaan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah serta kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah di suatu daerah dapat menjadi penghambat dalam

proses pembangunan ekonomi. Dalam rangka mengoptimalkan pembangunan ekonomi lokal di era ekonomi yang mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Secara otomatis menuntut pemerintah daerah untuk berorientasi secara global. Dikarenakan kondisi tingkat persaingan antar daerah yang semakin tinggi dan tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada perekonomian di Indonesia khususnya di daerah. Pemerintah perlu mengidentifikasi dan menganalisis sektor yang menjadi sektor potensial, sehingga dapat dijadikan sebagai penggerak pembangunan di daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah (Aryanti, 2009). Identifikasi sektor unggulan salah satunya dapat dilakukan dengan menggunakan metode ekonomi basis yaitu sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena mempunyai keuntungan kompetitif (*Competitive Advantage*) yang cukup tinggi, sedangkan sektor non basis merupakan sektor yang kurang potensial tetapi berfungsi sebagai penunjang sektor basis (Sjafrizal, 2008: 60).

Menurut Martono (2008), apabila suatu daerah sudah mengetahui potensi yang dimiliki, maka kesempatan daerah tersebut untuk bersaing akan lebih tinggi dibandingkan daerah yang belum mengetahui potensi daerahnya. Penentuan sektor potensial di setiap daerah dapat dilihat dari besar kecilnya pendapatan setiap 17 sektor ekonomi pada Produk Domestik Regional Bruto suatu wilayah. Penentuan sektor potensial melalui besarnya kontribusi pendapatan sektoral tidaklah cukup. Tingkat perubahan struktural dan sektoral yang tinggi, berkaitan dengan proses pertumbuhan ekonomi (Wiwekananda, 2016). Pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan perencanaan pembangunan yang sesuai di suatu daerah. Kebijakan yang akan ditetapkan oleh

pemerintah dalam pembangunan harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Penentuan kebijakan-kebijakan dalam proses pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan makmur untuk masyarakat yang berada pada suatu wilayah (Oka, 2015)

Dalam penelitian ini penulis memilih 2 kabupaten untuk dijadikan penelitian yaitu Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Mojokerto sebagai objek penelitian. Dikarenakan secara geografis letak kabupaten tersebut berdekatan tetapi berbeda tingkat Produk Domestik Regional Brutonya.

Setiap daerah memiliki kebijakan dengan tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan kesempatan peluang kerja bagi masyarakat daerah. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat harus saling berinisiatif untuk meningkatkan pembangunan daerah dengan menggunakan sektor yang memiliki potensi untuk dapat dikembangkan di setiap daerah.

Perbedaan wilayah yang signifikan membawa dorongan bagi pola pembangunan yang akan diterapkan. Penurunan pola kebijakan yang berhasil di suatu daerah belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi daerah lain. Oleh karena itu, pola kebijakan pembangunan suatu daerah harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah tersebut. Maka perlu dilakukan penelitian yang mendalam tentang keadaan dan potensi terkini pada masing-masing daerah untuk memperoleh informasi dan data yang berguna untuk menentukan arah perencanaan pembangunan daerah yang bersangkutan.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten

Tahun	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2016-2020 (Milyar)		
	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Lamongan	Kabupaten Mojokerto
2016	1.405.563.001	23.623.792,4	49.360.593,7
2017	1.482.299.001	24.922.950,5	52.187.821,0
2018	1.563.769.000	26.279.777,5	55.256.617,8
2019	1.650.143.000	27.706.168,3	58.467.158,2
2020	1.610.419.001	26.972.650,2	57.818.422,7

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2021

Tingginya pertumbuhan ekonomi dapat dilihat bahwa diantara Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan dalam perekonomian yang lebih tinggi dari Kabupaten Lamongan semakin tinggi tingkat PDRB maka semakin naik laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat tingkat pertumbuhan PDRB masing-masing kabupaten mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2016 sampai dengan 2019 akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2020 dikarenakan adanya hambatan di masa pandemi. Dari masing-masing kabupaten mempunyai perbedaan PDRB yang cukup jauh padahal kedua kabupaten tersebut memiliki letak tempat yang tidak jauh beda dan memiliki sumber daya alam (SDA) yang sangat melimpah sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber penghasilan.

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDRB dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Di Kabupaten Lamongan diakui bahwa kualitas sektor

pertanian yang baik dan juga terdapat beberapa faktor lain yang dapat memajukan daerahnya. Sedangkan di Kabupaten Mojokerto lebih berkembang salah satunya sektor industri pengolahan yang memberikan sumbangan besar yang bermanfaat terhadap perekonomian daerah tersebut. Selain itu Kabupaten Mojokerto juga memiliki industri-industri besar seperti Ajinomoto, Tjiwi, dan industri lainnya.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BPS) Jawa Timur kondisi perekonomian di Provinsi Jawa Timur tahun 2020 terkontraksi sebesar 2,39 persen. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Mojokerto. Dalam data BPS Kabupaten Mojokerto menjelaskan bahwa perekonomian Kabupaten Mojokerto juga mengalami kontraksi sebesar 1,11 persen. Hal ini dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 yang mempengaruhi semua sektor lapangan usaha. Sehingga menurunkan produksi barang maupun jasa yang juga berpengaruh pada turunnya angka pertumbuhan ekonomi.

Banyak usaha pemerintah dalam mempertahankan tingkat kinerja perekonomian di Kabupaten Mojokerto. Salah satunya adalah dengan memberikan perhatian utama kepada sektor potensial. Potensi perekonomian ini dapat dilihat dalam struktur perekonomian dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selama sepuluh tahun terakhir struktur perekonomian di Kabupaten Mojokerto tidak mengalami perubahan. Lapangan usaha industri pengolahan masih menjadi penopang terbesar dalam perekonomian yaitu sebesar 54,56 persen. Lapangan usaha lain yang menopang perekonomian Kabupaten Mojokerto adalah sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 10,07 persen.

Pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2021 dibandingkan triwulan IV tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan hampir semua kategori 17 sektor di PDRB mengalami penurunan. Terutama pada sektor pertanian mengalami kontraksi sebesar 18,03 persen hal ini disebabkan sektor industri pengolahan mengalami kenaikan 4,02 persen. Karena proses produksi dan pengiriman barang untuk ekspor sudah dibuka normal kembali sehingga mempermudah dalam lapangan usaha industri pengolahan. Pertumbuhan ekonomi triwulan II tahun 2021 dibandingkan triwulan I tahun 2021 mengalami kenaikan dengan penyumbang pertumbuhan terbesar dari sektor pertanian sebesar 40,11 persen. Karena merupakan puncak panen raya.

Perekonomian Kabupaten Mojokerto dalam triwulan III tahun 2021 dibandingkan triwulan II tahun 2021 meningkat sebesar 3,90 persen. Untuk pertumbuhan ekonomi kumulatif samoau dengan triwulan III tahun 2021 (c to c) sebesar 4,41 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sementara sampai dengan tiga perempat perjalanan di tahun 2021 sudah menunjukkan tren yang baik dibandingkan kondisi tahun 2020.

Pada Kabupaten Lamongan sejak awal pandemi Covid-19, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan sebagai perangkat untuk mengendalikan penyebaran Covid -19, melindungi masyarakat rentan sosial dan ekonomi, sekaligus mendorong kelangsungan dunia usaha. Menurut Bupati Kabupaten Lamongan , reformasi struktural merupakan hal yang sangat fundamental dalam pemulihan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi karena Kabupaten Lamongan bukan hanya harus tumbuh, tapi tumbuh dengan cepat dan berkelanjutan.

Penentuan sektor potensi sangat diperlukan dalam pengembangan pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Sektor pertanian Kabupaten Lamongan mampu menahan turunnya pertumbuhan ekonomi, menyumbang pertumbuhan positif 2,59 persen pada kuartal IV tahun 2020. Dengan demikian sektor pertanian mampu bertahan pada masa pandemi, bahkan pertumbuhan sektor pertanian di Kabupaten Lamongan juga diakui kualitasnya baik di tingkat provinsi maupun nasional. Lamongan dikenal sebagai lumbung pangan peringkat pertama di Provinsi Jawa Timur dan memasuki jajaran lima besar nasional.

Kabupaten Lamongan menjadi daerah dengan produksi padi tertinggi di Jawa Timur dengan jumlah produksi 0,87 juta ton. Disusul peringkat kedua Kabupaten Ngawi sebanyak 0,83 juta ton, dan ketiga Kabupaten Bojonegoro sebanyak 0,74 juta ton. Produk pertanian di Lamongan tidak hanya padi, namun produksi jagung juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini berdampak dari kebijakan Bupati tentang pengembangan kawasan budidaya jagung modern di Kabupaten Lamongan. Produksi jagung Lamongan mencapai 568,474 ton, dari lahan sekitar 55,957 ha.

Pemerintah Kabupaten Lamongan akan menyampaikan program prioritas guna mendorong pertumbuhan ekonomi akibat Covid-19. Program tersebut diantaranya yaitu peningkatan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM dan pengembangan Ekonomi Kreatif. Dalam menjalankan program tersebut dengan jalan peningkatan nilai tambah ekonomi melalui peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan, dan pangan hasil laut secara berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata.

Pada dasarnya, jika pemerintah Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Mojokerto dapat memahami dengan benar potensi ekonomi apa yang dimiliki oleh masing-masing daerah dan dapat dikelola dengan baik maka bukan tidak mungkin Produk Domestik Regional Bruto 2 Kabupaten tersebut dapat meningkat dan pertumbuhan ekonominya dapat melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa timur. Oleh karena itu pemerintah perlu mempertahankan potensi sektor yang dimiliki masing-masing daerah dan membuat kebijakan khusus di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Mojokerto untuk dapat memperbaiki kondisi perekonomiannya agar lebih baik.

Dari latar belakang diatas, untuk mengetahui sektor basis dan non basis serta melihat pertumbuhan di daerah tersebut maka dalam penelitian ini akan menganalisis lebih lanjut mengenai **“ANALISIS POTENSI SEKTOR EKONOMI PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN LAMONGAN DAN KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR ”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Sektor apa saja yang merupakan sektor basis dan sektor non basis yang diidentifikasi sebagai sektor potensial di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Mojokerto tahun 2016-2020?
2. Sektor apa saja yang mendorong dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Mojokerto?
3. Apakah pertumbuhan sektor potensial ekonomi yang ada di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Mojokerto tergolong sebagai daerah yang memiliki sektor maju dan tumbuh cepat?

1.3 Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertumbuhan sektor basis dan non basis di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Mojokerto yang bersifat potensial.
2. Untuk mengetahui sektor-sektor apa saja yang mendorong dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Mojokerto.
3. Untuk mengetahui pertumbuhan sektor potensial yang tergolong sebagai daerah yang memiliki sektor maju dan tumbuh cepat di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Mojokerto.

1.4 Ruang Lingkup

Berdasarkan terbatasnya kemampuan peneliti maka dalam penelitian ini memuat batasan masalah agar peneliti dapat terfokus terhadap penelitian. Dalam penelitian membatasi masalah hanya meliputi pada PDRB dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016-2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, dapat mengetahui perbedaan kontribusi sektor ekonomi di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Mojokerto
2. Bagi Instansi Pemerintahan, dapat menjadikan penelitian ini sebagai pertimbangan dalam memberikan kebijakan untuk mengolah sektor unggulan di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Mojokerto.

3. Bagi Mahasiswa, agar dapat digunakan untuk referensi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti tentang potensi sektor ekonomi pembangunan daerah.
4. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Sebagai kontribusi untuk menambah khasanah ilmu, khususnya untuk perbendaharaan literatur dilingkungan kampus Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.